



Penguatan Akuntabilitas melalui Pendampingan Penyusunan LKPJ Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan

Novayanti Sopia Rukmana^{1*}, Sulmiah², Asri Nur Aina³, Febrianto Syam⁴, Anna Fiulaizi⁵

¹ Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: novayanti@unm.ac.id

² Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: sulmiah@unm.ac.id

³ Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: asrinuraina@unm.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia, email: febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

⁵ Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: anna.fiulaizi@unm.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Diajukan: 2025-09-20

Diterima: 2025-09-28

Diterbitkan: 2025-11-20

Keywords:

Accountability; LKPJ;
Collaborative Governance;
Capacity Building; Local
Government; Performance
Reporting

Kata Kunci:

Akuntabilitas; LKPJ;
Collaborative Governance;
Capacity Building;
Pemerintah Daerah;
Pelaporan Kinerja



Abstract

The aim of this community service activity was to strengthen accountability in government performance reporting through technical assistance for the preparation of the Local Government Accountability Report (LKPJ) at the Department of Manpower and Transmigration of Nunukan Regency. The issue identified at the partner institution was the inconsistency of data across divisions, limited understanding of result-based reporting, and difficulties in formulating output–outcome indicators aligned with regional development targets. The activity was conducted using a participatory and collaborative coaching approach involving lecturers from the Public Administration Study Program of Universitas Negeri Makassar. The implementation consisted of four stages: initial assessment, desk-based consultation with each division, technical assistance for report preparation, and validation of performance data. The results show significant improvement in apparatus capacity related to the use of performance indicators, data analysis, and reporting based on measurable results. The activity also produced a standardized reporting template that integrates input–output–outcome logic, enabling more structured documentation and transparent reporting. This program demonstrates that collaboration between universities and local governments effectively enhances accountability and improves the quality of performance reporting. Sustainability recommendations include periodic performance reviews and replication of this model in other local government departments.

Abstrak



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2025 Novayanti Sopia
Rukmana, Sulmiah, Asri Nur Aina,
Febriyanto Syam, Anna Faulizi

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperkuat akuntabilitas dalam pelaporan kinerja pemerintah melalui pendampingan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Permasalahan yang teridentifikasi pada mitra adalah belum seragamnya format pelaporan antarbidang, keterbatasan pemahaman terhadap pelaporan berbasis hasil, serta kesulitan dalam merumuskan indikator output dan outcome yang selaras dengan target pembangunan daerah. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan pendampingan partisipatif dan kolaboratif oleh dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Implementasi kegiatan mencakup empat tahap: asesmen awal, desk data bersama setiap bidang, pendampingan teknis penyusunan laporan, dan validasi data capaian kinerja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas aparatur dalam menggunakan indikator kinerja, menganalisis data, serta menyusun laporan berdasarkan hasil yang terukur. Selain itu, kegiatan menghasilkan template pelaporan berbasis input-output-outcome yang memungkinkan dokumentasi data lebih terstruktur dan transparan. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah efektif meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan kinerja. Rekomendasi keberlanjutan meliputi pelaksanaan review kinerja berkala serta replikasi model pendampingan pada perangkat daerah lainnya.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada transparansi, efektivitas, dan keterbukaan hasil pembangunan. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yaitu laporan tahunan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. LKPJ menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa setiap program dan anggaran publik dijalankan sesuai rencana, serta hasilnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik (Bovens, 2007, 2010). Dalam konteks otonomi daerah, penyusunan LKPJ juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus mengukur efektivitas kebijakan pembangunan daerah (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Namun dalam praktiknya, penyusunan LKPJ di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kapasitas teknis aparatur dan kualitas data yang digunakan. Permasalahan seperti ketidakterpaduan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan pemahaman mengenai indikator kinerja, serta kurangnya kemampuan analisis terhadap capaian program sering menyebabkan laporan LKPJ belum sepenuhnya menggambarkan kinerja pembangunan secara objektif dan berbasis hasil. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Nunukan, di mana proses penyusunan LKPJ masih memerlukan penguatan dari sisi tata kelola pelaporan dan kemampuan teknis aparatur.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan tenaga kerja, pelatihan produktif, penempatan kerja, serta pembinaan transmigrasi. Kompleksitas urusan yang ditangani oleh dinas ini menuntut sistem pelaporan kinerja yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, hasil asesmen awal menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyusunan LKPJ, terutama pada aspek integrasi data antarbidang, pemahaman terhadap logika kinerja (input–output–outcome), serta penggunaan indikator hasil (outcome-based indicators). Tantangan tersebut mengindikasikan perlunya pendampingan teknis yang sistematis agar aparatur di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mampu menghasilkan laporan kinerja yang lebih valid dan terstandar.

Perguruan tinggi, dalam hal ini Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar (UNM), memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyedia pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses pembelajaran dan inovasi birokrasi. Kolaborasi akademisi dan pemerintah daerah mencerminkan prinsip collaborative governance, di mana berbagai aktor berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan publik bersama melalui dialog, pertukaran pengetahuan, dan proses pembelajaran kolektif (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Pendekatan ini relevan untuk memperkuat kapasitas institusional pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola berbasis hasil (result-based governance) dan nilai publik (public value).

Akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Bovens, 2007, 2010) menyebut bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai virtue dan mechanism: sebagai virtue, akuntabilitas merupakan komitmen etis pejabat publik untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya; sementara sebagai mechanism, ia berfungsi sebagai sistem formal untuk memastikan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil kinerja.

Dalam konteks penyusunan LKPJ, kedua aspek ini menjadi sangat penting, karena laporan tersebut merupakan sarana untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus menumbuhkan budaya integritas dan keterbukaan di tubuh birokrasi (J V Denhardt & Denhardt, 2015). Penelitian (Susanti & Rukmana, n.d.) membuktikan bahwa kinerja pelayanan publik yang akuntabel dan transparan memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga penguatan sistem pelaporan kinerja seperti LKPJ menjadi prasyarat penting dalam membangun legitimasi birokrasi. Hal ini juga sejalan dengan temuan (N. S. Rukmana, 2022; S. Rukmana, n.d.) yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional dalam pengelolaan data

dan pelaporan kinerja secara signifikan meningkatkan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan Penguatan Akuntabilitas melalui Pendampingan Penyusunan LKPJ Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan merupakan upaya nyata akademisi dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur daerah. Melalui kegiatan pendampingan ini, tim dosen dari Program Studi Administrasi Publik UNM berkolaborasi dengan aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk melakukan perbaikan pada sistem penyusunan laporan, penguatan pemahaman indikator kinerja, serta validasi data capaian program. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan partisipatif, di mana setiap aparatur didorong untuk memahami hubungan logis antara kegiatan, keluaran, dan hasil pembangunan.

Dengan demikian, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam penyusunan LKPJ yang lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya akuntabilitas publik di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, serta menjadi model praktik baik (*best practice*) bagi OPD lain di daerah tersebut. Melalui kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah, pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja publik yang berkualitas.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk memperkuat kapasitas aparatur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pendekatan partisipatif menempatkan aparatur dinas sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam setiap tahapan kegiatan, sedangkan kolaboratif menggambarkan hubungan kemitraan antara tim dosen dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar dengan pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan dengan empat tahapan utama. Pertama, koordinasi awal dan asesmen kebutuhan, dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan teknis dan substantif dalam penyusunan LKPJ tahun sebelumnya, seperti ketidakterpaduan data antarbidang dan lemahnya pemahaman indikator hasil. Kedua, pelaksanaan desk OPD, yaitu forum pendampingan langsung bagi kepala bidang dan staf pelaksana untuk menelaah data capaian program dan kesesuaian indikator kinerja dengan sasaran RPJMD dan RKPD. Tahap ketiga adalah pendampingan teknis penyusunan laporan, di mana tim dosen berperan sebagai *knowledge facilitator* dalam membantu aparatur memperbaiki format laporan dan menganalisis keterkaitan antara input, output, dan outcome kegiatan. Tahap ini mengadopsi prinsip *result-based management* yang menekankan pentingnya penggunaan data kinerja sebagai dasar penyusunan laporan publik (Kusek & Rist, 2004)

Keempat, validasi dan evaluasi hasil kegiatan, dilakukan secara partisipatif untuk menilai kesesuaian data, kejelasan indikator, dan keakuratan capaian. Metode ini dirancang untuk menghasilkan pembelajaran bersama dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Dengan model collaborative capacity building ((Bryson, 2018; Bryson & Crosby, 2015; Crosby & Bryson, 2005)), kegiatan ini tidak hanya memperbaiki aspek teknis pelaporan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dilaksanakan melalui mekanisme kolaboratif antara dosen Universitas Negeri Makassar dan aparatur dinas. Proses pendampingan berlangsung dinamis dan partisipatif, di mana setiap bidang di dalam dinas dilibatkan dalam kegiatan desk data, validasi capaian, serta perbaikan narasi pelaporan kinerja. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum pembelajaran bagi aparatur untuk memahami hubungan antara indikator program dan capaian pembangunan daerah.

Proses Pelaksanaan

Pendampingan Proses pelaksanaan dimulai dengan asesmen awal terhadap laporan LKPJ tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan umum. Tim dosen menemukan bahwa pelaporan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi masih cenderung administratif, terbatas pada penyajian data kegiatan tanpa penjelasan menyeluruh mengenai hasil dan dampak program. Berdasarkan temuan ini, tim pengabdian merancang pendekatan pendampingan berbasis result-based management agar aparatur dapat memahami bahwa setiap aktivitas harus dikaitkan dengan hasil pembangunan yang terukur ((Kusek & Rist, 2004)).

Kegiatan pendampingan kemudian dilanjutkan melalui serangkaian forum desk per bidang. Setiap bidang mempresentasikan capaian program, indikator kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kegiatan. Tim dosen berperan sebagai fasilitator untuk membantu aparatur mengidentifikasi kesesuaian antara indikator yang digunakan dengan sasaran dalam RPJMD dan RKPD. Melalui proses ini, aparatur mulai memahami bahwa laporan kinerja tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Kegiatan desk dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh kepala bidang dan staf teknis untuk memastikan bahwa setiap data capaian yang disampaikan telah sesuai dengan indikator dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Proses ini tidak hanya menjadi forum klarifikasi dan verifikasi data, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran

bersama antara tim dosen dan aparatur dinas. Pada tahapan ini, tim pendamping dari Universitas Negeri Makassar memberikan asistensi langsung terhadap penyelarasan data dan penyusunan narasi capaian kinerja. Suasana diskusi yang interaktif membuat proses pendampingan berjalan efektif, karena setiap bidang dapat langsung memperbaiki data dan format pelaporan berdasarkan masukan yang diberikan. Dokumentasi kegiatan desk ditampilkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Proses pelaksanaan Desk untuk meminta data terkait LKPJ

Selama proses pelaksanaan, tim pengabdian memperkenalkan format pelaporan baru yang menekankan keterpaduan antara input, output, dan outcome kegiatan. Format ini disusun secara partisipatif agar dapat diterima oleh seluruh bidang. Setiap bidang kemudian menyusun data capaian menggunakan format tersebut dan melakukan *cross-check* dengan bidang lain untuk menghindari duplikasi informasi. Model kolaboratif ini membangun mekanisme koordinasi internal baru di dalam dinas dan memperkuat budaya komunikasi lintas bidang. Dalam konteks *collaborative governance*, proses ini menunjukkan bagaimana interaksi antaraktor dalam satu organisasi dapat meningkatkan kejelasan tujuan bersama serta memperbaiki proses kerja (Ansell & Gash, 2008)

Hasil Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan pendampingan menghasilkan peningkatan kapasitas aparatur secara signifikan. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian besar aparatur memahami penyusunan LKPJ sebagai kegiatan administratif tahunan yang hanya memerlukan kompilasi data program. Setelah pendampingan, terjadi pergeseran perspektif di mana aparatur mulai memandang pelaporan kinerja sebagai instrumen akuntabilitas publik yang menunjukkan hasil nyata dari kebijakan dan program pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas ini tercermin dari beberapa perubahan konkret. Pertama, aparatur lebih mampu mengidentifikasi indikator hasil yang relevan dengan sasaran strategis organisasi. Misalnya, indikator yang sebelumnya hanya menekankan jumlah pelatihan kini dilengkapi dengan ukuran hasil seperti persentase peserta pelatihan yang terserap kerja. Kedua, kemampuan analisis terhadap data kinerja meningkat, dibuktikan dengan kemampuan aparatur menjelaskan penyebab perbedaan antara target dan realisasi. Ketiga, staf pelaksana mulai terampil dalam menggunakan pendekatan evidence-based reporting dengan menautkan bukti dokumen kegiatan dan data kuantitatif pada narasi capaian.

Selain peningkatan keterampilan teknis, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap profesional. Aparatur menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi dan evaluasi hasil kerja, serta mengembangkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kualitas laporan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Janet V Denhardt & Denhardt, 2015) bahwa akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan sistem pelaporan, tetapi juga dengan kesadaran moral aparatur untuk mempertanggungjawabkan hasil kebijakan kepada masyarakat. Dalam konteks implementasi kebijakan di Indonesia, (N. S. Rukmana, 2022) menemukan bahwa kepercayaan (*trust*) yang dibangun melalui transparansi dan konsistensi pelaporan kinerja menjadi modal sosial penting dalam memperkuat jaringan implementasi kebijakan. Lebih lanjut, studi (N. S. Rukmana, Aina, Johansyah, Manda, & Halim, 2023) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas teknis pelaporan, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam konteks ini, kegiatan pendampingan berperan sebagai sarana transformasi nilai birokrasi dari sekadar kepatuhan administratif menuju budaya kerja berbasis hasil dan integritas.

Dampak Kegiatan terhadap Tata Kelola Pelaporan

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak langsung terhadap tata kelola pelaporan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pelaporan antarbidang belum memiliki standar format yang sama dan sering terjadi tumpang tindih data. Setelah pendampingan, terbentuk keseragaman format dan sistem dokumentasi capaian kinerja yang lebih rapi. Template pelaporan berbasis indikator utama dan capaian hasil kini menjadi acuan bersama bagi seluruh bidang. Dengan format baru tersebut, proses kompilasi laporan LKPJ menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dievaluasi oleh pimpinan.

Selain aspek format, pendampingan juga memperbaiki koordinasi dan komunikasi internal antarbidang. Kegiatan desk dan validasi data yang dilakukan secara kolektif membangun ruang kolaborasi antarpegawai dari berbagai bidang. Hal ini mengurangi ego sektoral dan meningkatkan kesadaran bahwa capaian kinerja organisasi merupakan hasil kerja bersama. Dinamika ini

memperlihatkan bagaimana kolaborasi internal mampu memperkuat tata kelola data dan mendorong peningkatan efektivitas pelaporan (Bryson, 2018; Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014; Crosby & Bryson, 2005)

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini juga melahirkan inisiatif baru berupa penjadwalan review kinerja triwulanan di internal dinas. Dengan mekanisme tersebut, setiap bidang kini diharuskan memperbarui data capaian secara berkala agar lebih mudah dievaluasi menjelang penyusunan LKPJ tahunan. Inovasi kelembagaan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam manajemen kinerja pemerintahan daerah (Hartley, 2018)

Secara umum, dampak kegiatan terhadap tata kelola pelaporan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Pendampingan telah mendorong terbentuknya budaya transparansi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban publik. Aparatur kini memahami bahwa laporan kinerja bukan sekadar dokumen internal, melainkan bentuk komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Perubahan paradigma ini memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan legitimasi kinerja pemerintah daerah di mata pemangku kepentingan.

Pembahasan Teoritik: Akuntabilitas dan Collaborative Governance

Secara teoritik, hasil kegiatan ini memperkuat gagasan bahwa akuntabilitas publik merupakan proses sosial yang dibentuk melalui interaksi antara aktor-aktor birokrasi, masyarakat, dan lembaga eksternal seperti perguruan tinggi. (Bovens, 2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai virtue dan mechanism. Dalam konteks kegiatan ini, pendampingan oleh akademisi berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong penerapan nilai-nilai akuntabilitas (virtue) di dalam birokrasi. Aparatur tidak hanya memahami prosedur pelaporan, tetapi juga menginternalisasi nilai tanggung jawab publik.

Selain itu, kegiatan ini mencerminkan prinsip collaborative governance yang menekankan peran kolaborasi lintas aktor dalam menciptakan solusi atas masalah publik (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). Kolaborasi antara akademisi dan aparatur pemerintah dalam penyusunan LKPJ membuktikan bahwa penciptaan nilai publik dapat dilakukan melalui proses pembelajaran bersama. Dalam proses ini, dosen berperan sebagai fasilitator pengetahuan (knowledge broker), sementara aparatur menjadi agen perubahan di lingkup birokrasi. Hasilnya adalah peningkatan kapasitas institusional dan terbangunnya kepercayaan antara kedua pihak, yang merupakan prasyarat penting dalam tata kelola kolaboratif ((Bryson, 2018)).

Dari perspektif *public value governance*, kegiatan ini menunjukkan bagaimana penguatan akuntabilitas publik dapat menciptakan nilai sosial yang lebih luas. (K. D. Moore, 2014; M. H. Moore, 1997) menekankan bahwa penciptaan nilai publik tidak hanya ditentukan oleh efisiensi administratif, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu membangun kepercayaan dan

keterlibatan dengan masyarakat. Dengan memperbaiki kualitas pelaporan LKPJ, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nunukan kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan berbasis data dan menjelaskan hasilnya secara transparan kepada publik.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana pengabdian perguruan tinggi dapat menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi daerah. Pendekatan kolaboratif yang dilakukan memperlihatkan bahwa peningkatan akuntabilitas tidak harus melalui mekanisme pengawasan semata, tetapi dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran kolektif, transfer pengetahuan, dan kolaborasi berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan penyusunan LKPJ di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan tidak hanya menghasilkan perbaikan administratif, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Penguatan Akuntabilitas melalui Pendampingan Penyusunan LKPJ Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan laporan kinerja tahunan yang lebih terukur, konsisten, dan berbasis hasil. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini tidak hanya memperbaiki aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga memperkuat kesadaran aparatur terhadap pentingnya akuntabilitas publik sebagai nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses pendampingan yang dilakukan secara sistematis melalui forum desk OPD, bimbingan teknis, dan validasi data lintas bidang telah membantu dinas dalam membangun sistem pelaporan yang lebih transparan dan akurat.

Dampak kegiatan ini terlihat pada peningkatan kemampuan aparatur dalam merumuskan indikator hasil yang relevan, melakukan analisis capaian berdasarkan data faktual, serta menyusun laporan dengan format yang terstandar. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa aparatur tidak lagi memandang LKPJ sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen evaluatif yang merefleksikan efektivitas kebijakan dan program pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan inovasi kelembagaan berupa penerapan template pelaporan berbasis input–output–outcome serta jadwal review data secara berkala yang memperkuat koordinasi internal antarbidang.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini memperkuat pandangan teoretis mengenai pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Keterlibatan akademisi dari Universitas Negeri Makassar menunjukkan bahwa kemitraan antara dunia pendidikan dan birokrasi dapat menciptakan nilai publik melalui proses collaborative capacity building yang

menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan komitmen bersama terhadap transparansi kinerja.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini memberikan kontribusi strategis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan mengembangkan panduan internal penyusunan LKPJ yang mengacu pada prinsip pelaporan berbasis hasil dan menerapkan mekanisme evaluasi partisipatif secara rutin. Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah perlu dilanjutkan dalam bentuk pelatihan lanjutan, klinik data pembangunan, serta pendampingan lintas sektor agar praktik akuntabilitas publik yang telah dibangun dapat berkembang menjadi budaya kelembagaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. John Wiley & Sons.
- Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2015). and Laura Bloomberg. *Creating Public Value in Practice*, 369.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2005). *Leadership for the common good: Tackling public problems in a shared-power world* (Vol. 264). John Wiley & Sons.
- Denhardt, J V, & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service, Expanded Edition*. M.E. Sharpe. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=Gx6z49zYJJUC>

- Denhardt, Janet V, & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Hartley, J. (2018). Ten propositions about public leadership. *International Journal of Public Leadership*, 14(4), 202–217.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: a handbook for development practitioners*. World Bank Publications.
- Moore, K. D. (2014). *Effective instructional strategies: From theory to practice*. Sage Publications.
- Moore, M. H. (1997). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard university press.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford university press.
- Rukmana, N. S. (2022). Managing Trust In The Implementation Network Of Food Diversification Policy In South Sulawesi Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 116. <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.34165>
- Rukmana, N. S., Aina, A. N., Johansyah, O. N. P., Manda, D., & Halim, D. (2023). Penguatan Kelembagaan BUMDes: Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif di Pulau Lakkang. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 47–53.
- Rukmana, S. (n.d.). Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bone. *Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bone (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Susanti, G., & Rukmana, N. S. (n.d.). *Collaborative Innovation and Social Exchange: Implementing Policy Innovation in Indonesia*.